



Analisis Bentuk-Bentuk Sistem Informasi Manajemen Dalam Mendukung Kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat

Analysis of Management Information Systems in Supporting Performance at the Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning Service (DP3AP2KB) of West Sumatra Province

Yola Triana¹, Aura Fadhilah², Agel Efendi³, Yulia Hanoselina⁴

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Email : yolatriana17@gmail.com¹, arfdhlh3@gmail.com², agelefendi420@gmail.com³,

yuliahanoselina@fis.unp.ac.id⁴

Article Info

Article history :

Received : 26-04-2025

Revised : 28-04-2025

Accepted : 30-04-2025

Published : 02-05-2025

Abstract

This study aims to analyze the forms of Management Information Systems (MIS) in supporting the performance of DP3AP2KB of West Sumatra Province using a qualitative approach with a descriptive analytical method. Data collection was carried out through in-depth interviews and observations, conducted with informants who served as Young Expert Community Empowerment Drivers who were directly involved as Management Information Systems experts. The results of the study showed that DP3AP2KB of West Sumatra Province utilized various MIS that supported organizational performance, such as SIPD, Simbangda, SIMPEG, AbOn, SIGA, and SIMFONI PPA. The findings showed that MIS assisted in budget planning, personnel management, monitoring cases of violence, and data collection strategies. The challenges faced included employee rotation, technical infrastructure constraints, and increasing accessibility of information for the public. Therefore, it is necessary to increase human resource capacity through training and optimization of technological infrastructure so that MIS can function optimally in supporting public services.

Keywords : Management Information System, performance, DP3AP2KB

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam mendukung kinerja di DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, dilakukan dengan informan yang menjabat sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda yang terlibat langsung sebagai ahli Sistem Informasi Manajemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat memanfaatkan berbagai SIM yang mendukung kinerja organisasi, seperti SIPD, Simbangda, SIMPEG, AbOn, SIGA, dan SIMFONI PPA. Temuan menunjukkan bahwa SIM membantu dalam perencanaan anggaran, pengelolaan kepegawaian, pemantauan kasus kekerasan, dan pengumpulan data strategis. Tantangan yang dihadapi meliputi rotasi pegawai, kendala teknis infrastruktur, dan peningkatan aksesibilitas informasi bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan serta optimalisasi infrastruktur teknologi agar SIM dapat berfungsi secara maksimal dalam mendukung pelayanan publik.

Kata Kunci : DP3AP2KB, kinerja, pelayanan publik



PENDAHULUAN

Di era globalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) begitu pesat dan hampir menyentuh setiap aspek kehidupan. Teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu mengolah data, tetapi juga telah menjadi bagian dari cara mencari, membagikan, dan memahami informasi. Di masa sekarang, siapa pun bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan kapan saja, di mana saja, dan dari siapa saja. Integrasi teknologi sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program menjadi kunci utama menuju tata kelola yang lebih baik dan adaptif terhadap perubahan zaman (Parsaorantua et al., 2017).

Perkembangan era digital telah membawa perubahan besar dalam tata kelola pemerintah di Indonesia. Penggunaan teknologi informasi menjadi bagian yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas, transparansi, dan efisiensi bagi layanan publik. Kemajuan teknologi yang begitu cepat mengharuskan instansi pemerintah dapat beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Oleh sebab itu, dibutuhkan suatu sistem informasi yang dapat melakukan semua pengolahan data untuk fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan (Rakmeni & Pananrangi, 2024). Salah satu pemanfaatan teknologi ini adalah Sistem Informasi Manajemen (SIM).

Sistem Informasi merupakan kumpulan komponen yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan dalam sebuah organisasi. Sistem ini juga membantu manajer dalam menganalisis masalah, memahami informasi yang kompleks, dan mengembangkan produk baru. Secara sederhana, sistem informasi merupakan prosedur yang digunakan untuk mengolah data. Sistem ini terdiri dari berbagai elemen, seperti perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan (netware), sumber daya manusia (brainware), dan data (Frisdayanti, 2019).

Secara akurat sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi mengenai kondisi riil organisasi sehingga mampu menunjang peningkatan kualitas suatu organisasi/lembaga dalam bidang teknologi maupun sumber daya manusia (Sinta Dewi Octavia Sakti & Dwihanus Dwihanus, 2023). Sumber daya yang kompeten membutuhkan informasi yang tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif. Keberadaan sistem informasi sangat penting untuk mendukung para sumber daya manusia dalam melaksanakan tugas kerjanya, dengan mengakses hardware dan software, meminta dukungan pengembangan aplikasi dan memperoleh pelatihan (Lestari et al., 2021). Perusahaan yang ingin sukses harus memastikan bahwa manajemen memiliki informasi yang dibutuhkan untuk fokus pada pelaksanaan kerja yang optimal.

Perkembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) telah mengubah cara organisasi, baik swasta maupun publik dalam mengelola data dan informasi. Dalam lingkup pemerintahan, Sistem Informasi Manajemen (SIM) berperan penting dalam mengoptimalkan kinerja operasional dan pelayanan publik, terutama dalam instansi yang menangani aspek sosial dan kependudukan.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Sistem Informasi Manajemen (SIM) telah digunakan dalam berbagai aspek penting. Mulai dari penyusunan perencanaan anggaran, mengelola data pegawai, menampung laporan atau pengaduan dari masyarakat, hingga mencatat dan melaporkan pelaksanaan program-program di berbagai bidang. Penggunaan sistem yang terintegrasi tentu akan berjalan jauh lebih efektif jika sistem-sistem yang digunakan saling terhubung dan mendukung satu sama lain. Ketika SIM terintegrasi dengan baik, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan



dengan lebih cepat, dan data yang dihasilkan pun menjadi lebih akurat. Hal ini sangat penting, terutama saat suatu lembaga ingin mengevaluasi sejauh mana kinerja mereka berjalan sesuai tujuan.

Namun, meskipun penggunaan SIM di instansi pemerintah semakin luas, penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana bentuk-bentuk SIM digunakan untuk mendukung kinerja organisasi pemerintah daerah, terutama di sector sosial seperti pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih sangat terbatas. Terlebih lagi, kajian yang menyoroti integrasi antar SIM dalam konteks lembaga pemerintah daerah belum banyak ditemukan, seperti DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat. Inilah yang membuat penelitian ini menjadi penting dan relevan yang memberikan gambaran tentang praktik penerapan SIM di lapangan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu lembaga pemerintahan daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung upaya perlindungan sosial, mendorong kesetaraan gender, dan pengendalian pertumbuhan penduduk. Dinas ini memiliki tanggung jawab dalam dua sektor utama, yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

DP3AP2KB dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaannya DP3AP2KB mengacu pada Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana (Sari et al., 2024).

DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat bertugas mewakili kementerian terkait dalam memberdayakan perempuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya serta memastikan perlindungan hak-hak anak secara menyeluruh. Karena tugas dan tanggung jawab yang beragam, dinas ini memanfaatkan berbagai Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang andal agar program-program yang dijalankan dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

Untuk mendukung kinerja operasionalnya, dinas ini menggunakan berbagai SIM, seperti SIPD, Simbangda, SIMPEG, AbOn, SIGA, serta Simfoni PPA yang masing-masingnya memiliki peran dan tujuan spesifik. Namun, implementasi SIM di sektor publik tidak selalu berjalan lancar. Berbagai kendala teknis dan non-teknis sering muncul, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kurangnya koordinasi dan komunikasi, pendanaan, kendala dalam pengumpulan data, dan sebagainya. Pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai bentuk SIM yang digunakan, serta analisis perannya dalam kinerja organisasi sangat diperlukan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki dan dikembangkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk SIM yang digunakan oleh DP3AP2KB dan bagaimana sistem ini mendukung kinerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi SIM serta kendala yang dihadapi dalam penggunaannya.



METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk mengkaji secara mendalam mengenai Sistem Informasi Manajemen (SIM) di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Creswell John W. dan Cheryl N. Poth, 2023).

Pengumpulan data dilakukan melalui kombinasi dari dua teknik untuk memastikan validasi hasil penelitian. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan dengan informan yang menjabat sebagai Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda yang terlibat langsung sebagai ahli Sistem Informasi Manajemen. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pandangan dan pengalaman mereka terkait dengan penerapan SIM, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap kinerja individu dan organisasi (Seidman, 2019).

Kedua, observasi langsung dilakukan di lingkungan kerja DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat untuk mengamati bagaimana SIM diterapkan dan dampaknya terhadap kinerja pegawai. observasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana SIM digunakan dalam proses kerja sehari-hari dan bagaimana hal ini mempengaruhi kualitas pelayanan publik (Angrosino, 2016).

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2020) yang terdiri dari 3 tahap utama: kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dimulai dengan mengorganisir dan mereduksi data mentah menjadi kategori-kategori yang lebih terstruktur. Data kemudian disajikan dalam bentuk matriks, bagan, atau narasi yang memudahkan pemahaman terhadap pola-pola dan hubungan antar komponen yang diteliti.

Lokasi penelitian dipilih di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat dengan pertimbangan karakteristik khusus wilayah dan kompleksitas tugas yang diemban oleh institusi ini. Penelitian dilaksanakan pada Kamis, 20 Maret 2025. Jadwal penelitian disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan ketersediaan informan dan aksesibilitas terhadap data yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat merupakan institusi pemerintah daerah yang dibentuk sebagai respon terhadap kebutuhan integrasi kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. DP3AP2KB sebelumnya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membidangi satu urusan yaitu urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Per tanggal 21 Mei 2022 Dinas PPPA menjadi dinas DP3AP2KB dengan bertambahnya satu urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang sebelumnya berada di Dinas



pengendalian penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat terkait erat dengan upaya pemerintah untuk mengatasi isu-isu yang melibatkan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di tingkat provinsi.

Salah satu pendekatan penting yang diterapkan DP3AP2KB adalah pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat, khususnya perempuan. Program-program pelatihan ini mencakup berbagai bidang keterampilan dan pengetahuan, dengan tujuan utama untuk mendorong kemandirian serta memperluas peran perempuan dalam pembangunan. Selain itu, dinas ini juga menyediakan layanan konseling dan pendampingan, terutama bagi perempuan dan anak yang menghadapi situasi rentan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, atau masalah kesehatan reproduksi.

DP3AP2KB Sumatera Barat selaku penyelenggara dua urusan wajib pemerintahan, yaitu Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya mempunyai Visi: “TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT MADANI YANG UNGGUL DAN BERKELANJUTAN”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, instansi ini menetapkan 2 misi yang dilaksanakan secara berkesinambungan yaitu:

1. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah;
2. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang bersih, akuntabel, serta berkualitas.

DP3AP2KB Sumatera Barat mengalami beberapa perubahan sesuai dengan dinamika kebijakan nasional maupun daerah. Pembentukan dinas ini juga berkaitan dengan program-program nasional seperti Pembangunan Berwawasan Gender dan Keluarga Berencana yang menjadi prioritas dalam pembangunan sosial di Indonesia. DP3AP2KB juga dibentuk untuk mendukung pencapaian target-target nasional terkait pengarusutamaan gender, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk. Selain itu, DP3AP2KB juga berperan dalam melaksanakan program-program yang bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong pelaksanaan program Keluarga Berencana sebagai bagian dari upaya pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas keluarga.

Selain itu, DP3AP2KB aktif berperan dalam advokasi kebijakan, edukasi publik, serta membangun ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memfasilitasi forum diskusi, konsultasi kebijakan, serta kolaborasi multi-stakeholder, dinas ini menunjukkan komitmen terhadap prinsip inklusivitas dan partisipatif dalam perumusan program. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan kebijakan yang tidak hanya berbasis data, tetapi juga berpihak pada kelompok rentan dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan.

Hasil observasi dan analisis data mengenai Analisis Bentuk-Bentuk SIM dalam Mendukung Kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Sumatera Barat mengungkapkan beberapa temuan



penting berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Berikut adalah analisis dari hasil wawancara tersebut:

1. Bentuk-Bentuk SIM di DP3AP2KB Provinsi Sumbar

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari DP3AP2KB Prov Sumatera Barat, ditemukan bahwa instansi ini memanfaatkan berbagai Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang mendukung kinerja organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. SIM tersebut mencerminkan komitmen instansi dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Adapun bentuk-bentuk SIM yang digunakan meliputi:

a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

SIPD merupakan sistem resmi berbentuk aplikasi web dari Kementerian Dalam Negeri yang digunakan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan secara lebih terstruktur, memiliki menu input RKPD, RKA, dan dokumen anggaran lainnya. Sistem ini membantu DP3AP2KB dalam menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan dengan lebih teratur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat. Melalui sistem ini, program-program kerja dapat disusun berdasarkan kebutuhan aktual masyarakat dan diselaraskan dengan arah kebijakan nasional.

b. Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Simbangda)

Simbangda berperan sebagai sistem pendukung dalam pemantauan pelaksanaan program pembangunan. Pemerintah daerah menggunakan aplikasi Data Berbasis Elektronik/E-Database untuk mengumpulkan, mengisi, dan mengevaluasi data. Database pembangunan dan keuangan nasional dan daerah serta analisis data daerah secara nasional dapat dilakukan melalui SIPD.

Sistem ini mencatat perkembangan fisik dan keuangan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB. Dengan informasi tersebut, pimpinan instansi dapat mengetahui apakah program berjalan sesuai rencana atau justru mengalami hambatan.

Melalui Simbangda, DP2AP2KB juga dapat menyusun laporan kinerja secara lebih mudah dan terukur. Laporan-laporan ini menjadi dasar dalam mengevaluasi pencapaian program, serta dalam mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan. Karena terintegrasi dengan SIPD, Simbangda membantu dalam menyusun rencana pembangunan yang lebih realistis dan berbasis data aktual.

c. Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG)

Untuk urusan kepegawaian, DP3AP2KB memanfaatkan SIMPEG sebagai alat utama berbentuk aplikasi berbasis web dalam mengelola data dan administrasi pegawai. sistem ini menyimpan informasi penting seperti riwayat jabatan, pendidikan, pelatihan, hingga absensi harian. Hal ini membuat proses administrasi menjadi jauh lebih cepat, rapi, dan tidak lagi bergantung pada dokumen fisik yang rawan tercecer.

Lebih dari sekedar alat pelaporan, SIMPEG juga membantu dalam perencanaan pengembangan karir. Data yang tersaji memungkinkan pimpinan untuk melihat potensi dan kebutuhan pelatihan pegawai secara objektif. Dengan terhubungnya SIMPEG ke sistem



penilaian kinerja, proses evaluasi pegawai pun menjadi lebih transparan dan adil.

d. Absen Online (AbOn)

Dalam upaya modernisasi administrasi kepegawaian, DP3AP2KB juga menggunakan AbOn atau sistem absensi online, yang dikembangkan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfo). Sistem ini menggantikan metode absensi manual yang sebelumnya masih menggunakan tanda tangan di kertas atau mesin fingerprint lokal.

Melalui AbOn, pencatatan kehadiran pegawai dapat dilakukan secara real-time, bahkan dari perangkat pribadi seperti ponsel. Hal ini memberikan gambaran kemudahan bagi pegawai sekaligus meningkatkan kedisiplinan, karena waktu dan lokasi absensi dapat langsung terdeteksi sistem. Bagi pimpinan, AbOn menjadi alat monitoring yang efektif untuk melihat pola kehadiran dan kinerja pegawai secara objektif.

e. Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)

SIGA hadir sebagai sistem yang dirancang untuk menghimpun data dan informasi terkait isu-isu gender dan anak secara komprehensif. Melalui SIGA, DP3AP2KB dapat mengases beragam informasi penting, mulai dari data demografi, pendidikan, kesehatan, hingga laporan kekerasan dan partisipasi perempuan dalam pembangunan.

Fungsi utama SIGA tidak hanya sebagai pusat data, tapi juga sebagai alat analisis yang membantu instansi melihat kesenjangan yang masih terjadi di masyarakat. Dengan analisis mendalam, SIGA membantu perumusan program-program yang lebih terfokus, seperti pemberdayaan perempuan kepala keluarga atau perlindungan bagi anak-anak yang beresiko tinggi.

Menariknya, SIGA juga dilengkapi dengan fitur pelaporan yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan kasus diskriminasi gender maupun pelanggaran hak anak. Ini menunjukkan bahwa SIGA bukan hanya alat internal pemerintah, tetapi juga sarana partisipasi masyarakat dalam membangun lingkungan yang lebih adil dan aman bagi semua.

f. Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA)

SIMFONI PPA menjadi salah satu sistem paling penting dalam konteks perlindungan sosial. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online, tanpa harus datang langsung ke kantor. Ini menjadi solusi penting, terutama bagi korban yang tinggal di daerah terpencil atau merasa takut untuk melapor secara tatap muka.

Melalui SIMFONI PPA, DP3AP2KB dapat mencatat dan memantau kasus-kasus kekerasan secara sistematis. Data yang dihimpun tidak hanya menjadi bahan laporan, tetapi juga menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan perlindungan yang lebih tepat sasaran. Sistem ini juga terhubung dengan layanan konseling dan pendampingan, sehingga korban kekerasan dapat langsung diarahkan untuk mendapatkan bantuan psikologis maupun hukum yang mereka butuhkan.

Meskipun setiap Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang digunakan dalam mendukung kinerja di DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat memiliki fokus dan tujuan yang



berbeda, masing-masing SIM memiliki hubungan yang erat dan mendukung satu sama lain untuk memastikan setiap proses di dalam organisasi berjalan dengan lancar, efisien, dan berbasis data yang akurat. Pada dasarnya, keterkaitan antar SIM ini menjadi kunci untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, serta meningkatkan transparansi dan efektivitas program-program yang ada.

Keterkaitan yang paling jelas terjadi antara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Simbangda). SIPD digunakan sebagai sistem untuk merencanakan anggaran dan kegiatan tahunan, yang meliputi berbagai program pembangunan dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak. Setelah program-program ini direncanakan, Simbangda menjadi sistem yang memantau dan mencatat realisasi dari kegiatan yang telah direncanakan, baik dari segi fisik maupun keuangan. Keterpaduan antar kedua SIM tersebut memungkinkan evaluasi terhadap pelaksanaan program secara menyeluruh, di mana data yang dimasukkan ke dalam SIPD sebagai bagian dari perencanaan dapat dibandingkan dengan data pelaksanaan yang ada di Simbangda. Dengan adanya sistem digital yang transparan dan akuntabel, kinerja instansi dalam mengelola anggaran dan menjalankan program jadi lebih jelas terlihat dan mudah diukur. Semua proses ini tercatat rapi, sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi. Keduanya saling melengkapi dalam memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas dan efisiensi program-program yang dilaksanakan.

Tidak hanya itu, SIMPEG yang mengelola data kepegawaian juga saling terhubung dengan sistem AbOn yang mencatat kehadiran pegawai setiap hari. Data yang tercatat dalam AbOn sangat penting untuk SIMPEG, yang nantinya digunakan untuk analisis lebih lanjut mengenai kinerja pegawai. Dengan mengetahui tingkat kedisiplinan pegawai melalui catatan kehadiran yang tercatat, SIMPEG dapat melakukan penilaian yang lebih objektif mengenai kinerja pegawai tersebut. Meskipun memiliki fungsi yang berbeda, jika kedua SIM ini diintegrasikan dengan baik, akan memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi.

Selain itu, keterkaitan antara SIGA dan SIMFONI PPA juga tidak kalah penting. SIGA berperan dalam mengumpulkan data mengenai kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak yang beresiko. Data ini sangat berguna bagi SIMFONI PPA yang memiliki tugas menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan adanya data dari SIGA, SIMFONI PPA dapat merespon kasus-kasus kekerasan yang terjadi secara lebih cepat dan tepat sasaran. Kerjasama antara kedua sistem ini sangat penting untuk menciptakan sistem perlindungan yang lebih cepat dan berbasis data yang valid, sehingga tindakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran dan efektif.

Jika seluruh sistem ini dapat diintegrasikan dengan baik, maka DP3AP2KB akan memiliki sebuah ekosistem informasi yang kuat. Di mana data yang terkumpul di berbagai sistem dapat saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Misalnya, data dari SIGA mengenai jumlah kasus kekerasan bisa digunakan dalam SIPD yang mana digunakan untuk merencanakan program perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan yang lebih tepat sasaran, data dari SIMFONI PPA juga dapat dijadikan referensi dalam penyusunan anggaran melalui SIPD. Di sisi lain, hasil evaluasi dari Simbangda dapat memberikan gambaran apakah program yang dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Semua data yang ada di



berbagai sistem ini, jika dipadukan akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai kinerja DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun saat ini integrasi antar sistem di DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat belum sepenuhnya terwujud secara sistematis, potensi untuk menghubungkan seluruh sistem ini sangat besar. Dengan pengelolaan yang lebih baik dan teknologi yang semakin berkembang, integrasi antar SIM dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan dan mempermudah proses operasional. Ke depannya, penguatan keterkaitan antar SIM di DP3AP2KB akan memberikan dampak positif bagi kemajuan organisasi, serta mampu mewujudkan program-program yang lebih responsif dan bermanfaat bagi masyarakat.

2. Peran SIM dalam Mendukung Kinerja di DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi berbagai Sistem Informasi Manajemen (SIM) di DP3AP2KB memiliki dampak signifikan terhadap kinerja organisasi, efisiensi operasional, serta akuntabilitas pelayanan publik. Beberapa peran SIM di DP3AP2KB diantaranya:

a. Peningkatan efisiensi operasional

Dengan adanya SIMPEG dan AbOn, pengelolaan data kepegawaian dan absensi pegawai menjadi lebih mudah dan transparan. Pegawai dapat mengetahui status kenaikan pangkat dan administrasi kepegawaian tanpa harus menggunakan data fisik, sehingga mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik, menekan penggunaan kertas, dan menghemat waktu pelayanan secara signifikan.

Efisiensi ini tidak hanya berdampak pada sisi administrasi, tetapi juga pada kualitas kerja pegawai. Ketika proses birokrasi menjadi lebih sederhana, pegawai dapat lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, data kepegawaian yang terdigitalisasi memungkinkan pimpinan mengambil keputusan berbasis informasi aktual.

b. Kemudahan pengaduan dan pemantauan kasus kekerasan

SIMFONI PPA memungkinkan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan secara langsung tanpa harus datang ke kantor dinas. Data yang masuk dapat dipantau secara real-time oleh kementerian, sehingga mempercepat tindak lanjut penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ini adalah contoh nyata bagaimana teknologi dapat memperluas akses keadilan bagi kelompok rentan. SIMFONI PPA menjadikan sistem perlindungan sosial lebih inklusif dan adaptif. Kecepatan dalam penanganan kasus bukan hanya meningkatkan efektivitas layanan, tetapi juga menunjukkan bahwa pemerintah hadir dan responsif terhadap isu-isu kemanusiaan yang sensitif. Efektivitas sistem ini memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap instansi layanan publik.

c. Pengelolaan data yang lebih akurat

Sistem seperti SIGA dan SIMFONI PPA mengandalkan data yang dikumpulkan dari kabupaten/kota sebelum diolah di tingkat provinsi. Data tersebut kemudian divalidasi dengan sumber lain, seperti data dari Badan Pusat Statistik (BPS), untuk memastikan



keakuratan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dengan sistem ini, DP3AP2KB dapat mengetahui secara detail lokasi-lokasi rawan kekerasan, wilayah dengan kesenjangan gender tinggi, atau kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus. Kemampuan untuk analisis data secara mendalam menjadi salah satu kunci keberhasilan program-program sosial yang tepat sasaran.

d. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Dengan adanya SIPD dan Simbangda, perencanaan dan realisasi anggaran menjadi lebih terstruktur dan mudah diawasi oleh berbagai pihak. Hal ini meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana dan memastikan bahwa setiap program berjalan sesuai rencana.

e. Pelayanan publik

Sistem seperti SIMFONI PPA, tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengaduan, tapi juga telah menjadi bagian penting dari pelayanan publik. Melalui sistem ini, korban kekerasan bisa melapor tanpa harus datang langsung ke kantor dinas. Mereka bisa mengakses layanan secara online yang sangat membantu bagi mereka yang takut, malu, atau tidak memiliki akses transportasi untuk datang langsung.

Dengan kemudahan ini, pelayanan menjadi lebih inklusif. Sistem ini menjadi jembatan awal bagi korban untuk memulai proses pemulihan tanpa harus merasa terpapar atau dihakimi oleh lingkungan sekitar.

3. Tantangan dalam Implementasi SIM di DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara, teridentifikasi bahwa terdapat beberapa tantangan dalam penggunaan SIM di DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat diantaranya:

a. Rotasi dan mutasi pegawai

Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah adanya rotasi dan mutasi pegawai yang berdampak pada keberlangsungan operasional sistem. Pegawai yang sebelumnya sudah terlatih dalam mengelola sistem, seperti operator SIMPEG atau SIGA dipindahkan ke bidang lain. Akibatnya, posisi tersebut diisi oleh pegawai baru yang belum memiliki keterampilan teknis terkait.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan rotasi belum sepenuhnya mempertimbangkan kesinambungan kompetensi teknis dalam pengelolaan sistem informasi. Meski dilakukan pelatihan ulang jangka pendek, namun untuk jangka panjang dibutuhkan pendekatan strategis, misalnya, dengan membentuk tim operator tetap yang memang difokuskan pada pengelolaan SIM, atau mengintegrasikan pelatihan SIM dalam program pengembangan karir pegawai secara rutin.

b. Kendala teknis dan infrastruktur

Ketika beberapa sistem mengalami gangguan, DP3AP2KB tidak dapat langsung menangani masalah tersebut secara mandiri. Mereka harus menunggu bantuan dari kementerian. Hal ini menjadi hambatan tersendiri, apalagi ketika laporan dari masyarakat yang tinggi. Selain itu, belum meratanya akses internet di beberapa wilayah, membuat pelaporan atau input data secara online tidak selalu bisa dilakukan dengan lancar.



Untuk mengatasi hal ini, penting bagi DP3AP2KB memperkuat infrastruktur teknologi dengan menjalin kerja sama dengan instansi terkait seperti Diskominfo dan penyedia layanan internet. Petugas di lapangan juga perlu mendapatkan pelatihan dasar agar bisa menangani kendala teknis secara cepat dan mandiri.

c. Aksesibilitas data bagi masyarakat

Meskipun sistem telah mampu mengelola dan menyimpan data dengan baik, tidak semua data tersebut sampai ke masyarakat. Bahkan, banyak informasi penting yang masih hanya tersedia di internal dinas. Kalaupun tersedia, format penyajian data seringkali terlalu teknis dan tidak mudah dipahami oleh masyarakat umum, terutama kelompok masyarakat di tingkat desa atau kelompok rentan.

Untuk melihat sejauh mana Sistem Informasi (SIM) berkontribusi terhadap kinerja DP3AP2KB, kita perlu melihat apakah sistem ini sudah sejalan dengan arah kebijakan operasional dan tujuan besar organisasi. Beberapa sistem seperti SIPD dan Simbangda sudah menunjukkan adanya keterkaitan yang baik antara proses perencanaan di awal dan hasil evaluasi di akhir. Namun, sejauh ini, penggunaan SIM masih lebih banyak berfokus pada hal-hal administratif. Artinya, SIM belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan jangka panjang. Padahal, dengan potensi integrasi lintas bidang yang dimiliki, SIM sangat mungkin dikembangkan ke arah tersebut di masa depan.

Hasil analisis menunjukkan adanya ketimpangan dalam fungsi antara berbagai jenis Sistem Informasi Manajemen (SIM). SIM yang bersifat teknis, seperti SIMPEG dan AbOn cenderung beroperasi dengan stabil karena memenuhi kebutuhan internal birokrasi. Sementara itu, SIM yang bertujuan mendorong transformasi sosial, seperti SIGA dan SIMFONI PPA, masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaporan dan kurangnya penggunaan data yang peka terhadap isu gender. Ketidakseimbangan ini berdampak pada arah kebijakan publik yang mengutamakan aspek teknis dibandingkan pada kebutuhan sosial masyarakat yang lebih luas.

Meskipun DP3AP2KB telah mengimplementasikan SIGA dan SIMFONI PPA sebagai alat untuk mendata kelompok rentan, tantangan terkait validasi dan kelengkapan data masih menjadi isu yang signifikan. Ketergantungan pada pelaporan yang pasif menyebabkan banyak kasus kekerasan tidak tercatat, yang akhirnya mempengaruhi pengambilan kebijakan yang hanya mengandalkan data yang ada. Padahal, salah satu kontribusi utama SIM seharusnya terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan yang belum terlihat dari kelompok yang terpinggirkan. Oleh karena itu, peran SIM harus berkembang, tidak hanya sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem yang mendeteksi masalah lebih awal melalui data sosial.

4. Pengembangan dan Optimalisasi SIM di DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan wawancara dengan informan, untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut dan meningkatkan efektivitas penggunaan SIM dalam mendukung kinerja DP3AP2KB, dibutuhkan upaya pengembangan dari SDM hingga teknologi, dari perencanaan internal hingga keterlibatan masyarakat diantaranya:



a. Peningkatan kapasitas SDM

Dinas perlu mengadakan pelatihan yang lebih rutin bagi operator SIM agar mereka dapat mengelola sistem dengan lebih baik. Pelatihan bukan hanya mengenai cara menggunakan sistem, tetapi juga tentang bagaimana membaca data, mengolahnnya, dan menjadikannya dasar dalam mengambil keputusan. SDM yang mengelola SIM perlu memahami bahwa sistem bukan hanya sekedar alat pelaporan, melainkan alat bantu dalam menyusun kebijakan publik yang efektif.

b. Peningkatan integrasi antar-SIM

Integrasi antara berbagai SIM yang digunakan di DP3AP2KB perlu ditingkatkan agar data dapat saling terhubung dan lebih mudah diakses oleh pemangku kepentingan terkait. Integrasi SIM akan memungkinkan data mengalir lebih lancar dan mencegah tumpang tindih. Integrasi juga dapat mempercepat penanganan kasus dan memperkuat koordinasi lintas bidang.

c. Pengembangan fitur baru

Beberapa sistem seperti SIGA dan SIMFONI PPA masih dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambah fitur analisis data yang lebih mendalam atau sistem notifikasi untuk pelaporan dan tindak lanjut kasus. Selain itu, pengembangan SIM yang tetap bisa digunakan dalam kondisi offline, lalu tersinkronisasi otomatis ketika jaringan tersedia akan sangat membantu kelancaran kerja di lapangan.

d. Peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat

Informasi yang ada dalam SIM perlu lebih mudah diakses oleh masyarakat, misalnya dalam menyediakan portal publik yang menampilkan data-data penting dalam format yang lebih ramah pengguna, seperti grafik, infografik, atau ringkasan sederhana. Penguatan akses publik terhadap sistem akan menciptakan iklim partisipatif yang lebih baik. Aplikasi atau portal harus dirancang dari sudut pandang pengguna, bukan hanya dari sisi teknis. Selain itu, penting juga dilakukan sosialisasi rutin ke masyarakat desa dan melibatkan tokoh lokal sebagai perantara informasi, agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan dipahami.

Dalam pengelolaan yang lebih optimal, SIM di DP3AP2KB dapat terus berkontribusi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Sumatera Barat.

Meskipun implementasi SIM di DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi organisasi, namun efektivitas masing-masing sistem belum berjalan secara merata. SIMFONI PPA misalnya, menunjukkan keberhasilan dalam memberikan kemudahan akses pelaporan kasus kekerasan secara daring, yang berdampak langsung terhadap kecepatan penanganan kasus. Namun, pada sisi lain, sistem seperti SIMPEG dan SIGA masih menghadapi hambatan dalam integrasi lintas bidang yang menyebabkan proses pengambilan keputusan kurang berbasis data secara menyeluruh.

Selain itu, konteks sosial-budaya di Sumatera Barat juga turut mempengaruhi efektivitas



SIM khususnya pada sistem pelaporan berbasis gender seperti SIMFONI PPA. Masih adanya rasa takut, tabu, dan tekanan sosial dalam pelaporan kekerasan membuat sebagian masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan sistem ini, meskipun secara teknis sudah tersedia.

Ke depannya, DP3AP2KB memiliki potensi besar untuk terus berinovasi dalam mengembangkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang lebih adaptif dan fleksibel melalui integrasi teknologi lanjutan seperti big data dan kecerdasan buatan (AI). Dengan membangun dashboard analitik secara real-time, mendeteksi pola kekerasan berdasarkan lokasi dan waktu, serta mengintegrasikan media sosial dalam sistem pelaporan, SIM dapat berfungsi tidak hanya sebagai alat administrasi, tetapi juga sebagai pendukung kebijakan yang responsif dan mampu memetakan daerah rawan secara lebih cepat, sehingga dapat melakukan pencegahan lebih awal.

Selain itu, DP3AP2KB juga dapat mengembangkan aplikasi berbasis komunitas yang dapat diakses lewat ponsel. Ini akan sangat membantu masyarakat di daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit menjangkau layanan dinas secara langsung.

Dengan membangun sistem informasi yang lebih terhubung, ramah pengguna, dan berjalan secara real-time, DP3AP2KB tidak hanya memperkuat manajemen internalnya, tapi juga tampil sebagai institusi yang tanggap terhadap perkembangan zaman dan benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat yang beragam dan dinamis.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di DP3AP2KB Provinsi Sumatera Barat telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung peningkatan kinerja instansi, terutama dalam aspek pengelolaan data, pelayanan public, dan pengambilan keputusan yang berbasis informasi actual. Penggunaan sistem seperti SIPD, Simbangda, SIMPEG, AbOn, SIGA, dan SIMFONI PPA menjadi bukti bahwa instansi ini telah bergerah ke arah digitalisasi yang progresif dan adaptif terhadap tuntutan zaman.

Setiap sistem yang digunakan memiliki fungsi yang spesifik namun saling melengkapi satu sama lain. SIPD dan Simbangda memperkuat perencanaan dan pelaporan program secara terstruktur, SIMPEG dan AbOn mendukung efisiensi manajemen kepegawaian, sementara SIGA dan SIMFONI PPA berperan penting dalam penyediaan data dan layanan perlindungan terhadap kelompok rentan. Keterpaduan antar sistem ini merupakan potensi besar untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang lebih efektif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, implementasi SIM di DP3AP2KB belum sepenuhnya lepas dari tantangan. Beberapa kendala seperti rotasi pegawai, keterbatasan teknis infrastruktur, serta kurangnya aksesibilitas informasi bagi publik menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sistem ke depan. Kondisi sosial-budaya juga menjadi faktor yang mempengaruhi otomatisasi penggunaan SIM, terutama dalam konteks pelaporan kekerasan berbasis gender.

Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan berkelanjutan seperti peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan rutin, pengembangan fitur-fitur baru pada sistem, serta peningkatan integrasi antar SIM. Perlu juga ada inisiatif untuk membuka akses publik terhadap data yang relevan, agar sistem informasi tidak hanya berfungsi sebagai alat internal, tetapi juga sebagai media edukasi dan partisipasi masyarakat.



Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan kebijakan yang memadai, SIM di DP3AP2KB tidak hanya akan menjadi instrumen pendukung teknis, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam membangun pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan berkeadilan. Transformasi digital yang berkelanjutan di lingkungan pemerintahan seperti ini akan memperkuat kepercayaan public dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angrosino, M. V. (2016). *Doing ethnographic and observational research*. SAGE Publications.
- Creswell John W. dan Cheryl N. Poth. (2023). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Barat. (n.d.). *Beranda*. <http://dp3ap2kb.sumbarprov.go.id/>
- Frisdayanti, A. (2019). Peranan brainware dalam sistem informasi manajemen. *JEMSI*, 1(1), 60–69. <https://doi.org/10.31933/JEMSI>
- Lestari, S. A., Ansari, I., & Rahim, S. (2021). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Dipt.Jasa Raharja Cabang Sulawesi Selatan Kota Makassar. *PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DI PT. JASA RAHARJA CABANG SULAWESI SELATAN KOTA MAKASSAR*, 2(3), 770–786. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/3852>
- Parsaorantua, P. humisar, Pasoreh, Y., & Rondonuwu, sintje A. (2017). Implementasi Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Studi Tentang Web E-Government Di Kominfo Kota Manado). *Acta Diurna*, VI(3), 1–14.
- Pratama, A. S., Sari, S. M., Hj, M. F., Badwi, M., & Anshori, M. I. (2023). Pengaruh Artificial Intelligence, Big Data Dan Otomatisasi Terhadap Kinerja SDM Di Era Digital. *Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen (JUPIMAN)*, 2(4), 108–123. <https://doi.org/10.55606/jupiman.v2i4.2739>
- Rakmeni, N., & Pananrangi, A. R. (2024). Sistem Informasi Manajemen Pada Kinerja Pegawai Di Distrik Sorong Barat Management Information System on Employee Performance in West Sorong District Pendahuluan Metode Penelitian. *Paradigma Journal of Administration*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.35965/pja.v2i1.4603>
- Sari, M. U., Hukum, B., Negara, T., Hukum, F., & Hatta, U. B. (2024). *PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PADANG DALAM PEMENUHAN KESEJAHTERAAN ANAK*.
- Seidman, I. (2019). *Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences* (5th ed.). Teachers College Press.
- Sinta Dewi Octavia Sakti, & Dwihanus Dwihanus. (2023). Peran Sistem Informasi Management (Sim) Dalam Pengambilan Keputusan. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 1(1), 212–225. <https://doi.org/10.59024/jumek.v1i1.43>